



HARYADI SUYUTI WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA



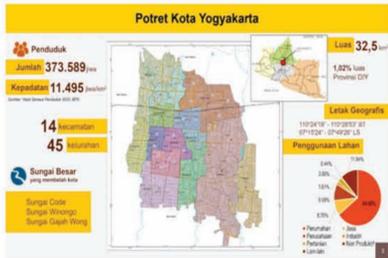
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020



HEROE POERWADI WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA

I. PENDAHULUAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 71 ayat (2) disebutkan bahwa penyampaian laporan tersebut adalah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, RKPD, dan APBD Tahun 2020.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH
Kota Yogyakarta terletak di antara 1100 24' 19" - 1100 28' 53" Bujur Timur dan antara 070 49'26" - 07015'24" Lintang Selatan, secara administratif wilayah Kota Yogyakarta berbatasan dengan:
Sebelah utara : Kabupaten Sleman
Sebelah timur : Kabupaten Sleman dan Bantul
Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
Sebelah barat : Kabupaten Bantul dan Sleman



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2020

III. CAPAIAN KINERJA MAKRO
Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kota Yogyakarta menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	86,65	86,61	-0,05%
2	Angka Kemiskinan	6,84%	7,27%	6,29%
3	Angka Pengangguran	4,80%	9,16%	90,83%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,90%	-2,42%	-140,60%
5	Pendapatan per Kapita	Rp 84.732.003,87	Rp 95.742.270,52	12,99%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,371	0,399*	7,55%

Catatan:
* Angka Proyeksi
Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2020, data diolah

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Pada tahun 2020, nilai IPM Kota Yogyakarta adalah 86,61. Nilai tersebut menjadi nilai IPM tertinggi di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan buah dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upayanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.



2. Angka Kemiskinan
Tahun 2020 BPS menetapkan garis kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar Rp 533.423,00 perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan baseline untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan tolak ukur tersebut, jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta tahun 2020 diestimasi sebanyak 31.620 jiwa. Jika dibandingkan dengan estimasi jumlah penduduk pada periode yang sama, yang oleh BPS diestimasi sekitar 434.938 jiwa, maka diketahui bahwa tingkat kemiskinannya adalah 7,27. Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan perubahan target angka kemiskinan yang semula 6,15 menjadi 13,97. Perubahan target ini didasarkan analisis berbasis data estimasi pertumbuhan ekonomi, terdapat lonjakan jumlah orang miskin terdampak Pandemi. Dengan tolak ukur tersebut, realisasi di Tahun 2020 telah melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta tahun2020, data diolah

3. Angka Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan perubahan target TPT pada tahun 2020 menjadi 10,46. Perubahan target ini didasarkan analisis berbasis perkiraan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan. Sektor yang paling terdampak akibat penurunan pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta adalah sektor akomodasi makan minum sebagai sektor utama pariwisata dan sektor industri pengolahan sebagai sektor ikutan dari pariwisata. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS pada tahun 2020 angka TPT Kota Yogyakarta sebesar 9,16, hal ini menunjukkan realisasi angka TPT telah melampaui target yang ditetapkan.



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta tahun2020, data diolah

4. Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,42% lebih rendah dari angka yang ditargetkan. Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, ekonomi berjalan seiring pertambahan jumlah kunjungan wisata mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemic Covid-19. Social Distancing sebagai upaya untuk penanggulangan Covid 19 memaksa masyarakat untuk mengurangi atau bahkan menghindari aktivitas di luar rumah termasuk kunjungan wisata. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak pada penurunan sektor riil atau berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta terutama pada Industri Hotel Restoran yang mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi pekerja atau bahkan pengurangan jumlah pekerja. Masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga mengalami penurunan pendapatan, misalnya Usaha Kecil Mikro (UKM) yang memproduksi dan atau menjual souvenir dan oleh-oleh, penjaja makanan, tukang becak, andong, dan pekerja sektor informal pariwisata lainnya.



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2020, data diolah

5. Pendapatan per Kapita
Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai pendapatan per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDR sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pendapatan per kapita Kota Yogyakarta tahun 2020 sebesar Rp 95.742.270,52 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 walaupun pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS tahun 2020.



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2020, data diolah

6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk menurun menggunakan indikator Indeks Ketimpangan Pendapatan. Indeks Ketimpangan Pendapatan atau Indeks Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19, Pemerintah Kota Yogyakarta merevisi target Indeks Gini pada Tahun 2020 yang semula 0,397 menjadi 0,592



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta tahun 2020, data diolah

Mendasarkan hasil proyeksi dengan mempertimbangkan trend angka gini ratio pada tahun sebelumnya, serta penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak Pandemi Covid-19, realisasi gini ratio pada tahun 2020 sebesar 0,399. Nilai ini lebih rendah 0,193 poin dibandingkan target dan naik 0,028 poin dibandingkan tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 0,39, masih terdapat selisih 0,009 poin untuk bisa mencapai target. Jika melihat gini ratio DIY dan Nasional, gini ratio Kota Yogyakarta lebih rendah dibanding DIY namun lebih tinggi dibandingkan nasional. Hal ini tentu menjadi catatan dalam menyusun program dan kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah sehingga kesenjangan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi tidak semakin lebar.

IV. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DASAR
Capaian kinerja pelayanan dasar di Kota Yogyakarta dapat dilihat melalui capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kebijakan mengenai penerapan SPM di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2019 tentang Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta serta Keputusan Wakil Kota Yogyakarta Nomor 476 Tahun 2019 tentang Jenis Pelayanan Dasar. Indikator dan target Capaian SPM. Guna mendukung penerapan SPM di Kota Yogyakarta telah disusun program maupun kegiatan yang sudah ada di dokumen perencanaan masing-masing perangkat daerah pengampu SPM. Capaian atas kinerja pelayanan dasar tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Pendidikan**
Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan terdiri atas:
1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan
Target pencapaian jenis pelayanan dasar bidang pendidikan tahun 2020 adalah 100%. Dari target tersebut, baik di tahun 2019 maupun tahun 2020 telah terealisasi 100%.



Gedung Bangunan SDN Kotagede 3 Yogyakarta



Ruang Perpustakaan

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 2020

b. Bidang Kesehatan
Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:
1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
Target Pencapaian SPM Kesehatan tahun 2020 untuk 12 indikator tersebut adalah 100% dan telah terealisasi 100%.

c. Bidang Pekerjaan Umum
Jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum terdiri atas:
1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehat hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah.
Target Pencapaian bidang pekerjaan umum tahun 2020 adalah 100%. Capaian kinerja pelayanan dasar bidang pekerjaan umum tahun 2020 untuk jenis pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehat hari adalah 100% dan capaian kinerja jenis pelayanan dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah adalah 98,56%.

d. Bidang Perumahan Rakyat
Jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat terdiri atas:
1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana;
2. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
Target Pencapaian bidang perumahan rakyat tahun 2020 adalah 100%. Dari target pada tahun 2020 telah terealisasi 100%.



Sumber: Dinas PUPKP, 2020

e. Bidang Trantubumlinmas
Jenis pelayanan dasar bidang trantubumlinmas terdiri atas:
1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Kebakaran.
Target Pencapaian bidang trantubumlinmas tahun 2020 adalah 100%. Capaian kinerja pelayanan dasar bidang Trantubumlinmas telah tercapai 100%.

Foto Proses Pemadaman Kebakaran di Ngadiwinatan Yogyakarta



Sumber: Dinas Kebakaran Kota Yogyakarta, 2020

f. Bidang Sosial
Jenis pelayanan dasar bidang trantubumlinmas terdiri atas:
1. Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar anak terlantar diluar panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut gelandangan dan pengemis diluar panti;
5. Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial.
Target Pencapaian bidang sosial tahun 2020 adalah 100%. Dari target tersebut telah terealisasi 100%.



Kegiatan Penyerahan Pemenuhan Kebutuhan PMKS/TRC Untuk Anak Terlantar 2020 (Sumber: DinasSosial, 2020)



Kegiatan Penyerahan Bantuan Jaminan Hidup Bagi Orang Terlantar Bulan September – Oktober 2020 (Sumber: DinasSosial, 2020)

V. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan apresiasi dari Kemendagri berupa Piagam Penghargaan yang Diterima Kota Yogyakarta Atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dengan Skor 3,4581 dan Status Kinerja Sangat Tinggi Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018.



Untuk indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini merupakan kesesalan kalinya Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan yang disusun. Hal ini menunjukkan akuntabilitas keuangan maupun kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berada di level tinggi, namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.



Penerimaan Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-11 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan, disampaikan pada perayaan ulang tahun ke-264 Kota Yogyakarta, tanggal 7 Oktober 2020.

VI. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berikut adalah penjabaran realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020:



Inovasi yang Dilaporkan Dalam Sistem IGA



Pada tahun 2020, Kota Yogyakarta memperoleh Penghargaan *Innovative Government Award (IGA) 2020* dengan Kategori Kota Inovatif yang diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada tanggal 18 Desember 2020.



Inovasi yang baik adalah inovasi yang berkelanjutan. Pada tahun 2018 Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan Inovasi Gandeng Gendong, yaitu inovasi yang mendorong 5K (lima komponen) pelaku pembangunan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan di Kota Yogyakarta. Ke lima komponen tersebut adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Perguruan Tinggi, Korporasi, Kampung, dan Komunitas. Inovasi Gandeng Gendong terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan fokus atau tema yang berbeda dan spesifik setiap tahunnya, tetapi tetap bersinergi, terintegrasi, dan berkelanjutan



Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2020

VIII. PENUTUP
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun anggaran 2020 telah kami sampaikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap stakeholder dan seluruh warga Kota Yogyakarta atas segala masukan, saran, dukungan dan kerjasama yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk atas segala doa dan upaya kita bersama dalam mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi lebih baik.

Sekian dan terima kasih.
Wabillahitauquf Walhidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

